

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data menggunakan SPSS 16.0, maka dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar.

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan dihitung dalam satuan jiwa. Dalam setiap pembangunan suatu wilayah pastinya sangat diperlukan peran utama dalam pembangunan tersebut yaitu penduduk, dimana penduduk merupakan penggerak utama dalam mengelola sumber daya yang ada. Seperti negara indonesia, indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana perkembangan jumlah penduduk pertahun nya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan hal ini selalu dikaitkan antara kependudukan dengan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan PAD, yaitu besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan akan meningkat pula. Akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proposional. Artinya dalam setiap hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah

kependudukan yang dihadapi, secara setiap daerah pasti memiliki masalah kependudukan dan potensi yang berbeda-beda.¹

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Sehingga dapat diartikan apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan, dan sebaliknya apabila terjadinya penurunan pada jumlah penduduk maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik komposisi penduduk di wilayah Kota Blitar rata-rata perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lebih besar jumlah perempuan, akan tetapi tidak serta merta penduduk yang banyak perempuannya menggambarkan ketidak produktifan, justru hal ini akan menambah tingkat produktivitasnya. Dikarenakan di Kota Blitar tidak adanya perusahaan besar seperti di Malang, Tulungagung, dan Kediri, dan dampak dari itu akan menimbulkan pengembangan sektor informal oleh pemerintah Kota Blitar untuk menuju kota pariwisata dan perdagangan. Dan untuk mendukung kepariwisataan dan perdagangan tersebut yaitu dengan pengembangan sektor UMKM serta melalui pembinaan bantuan dari koperasi seperti pelatihan home industri sentra makanan khas Kota Blitar kemudian produk-produk unggulan seperti tas dan sebagainya, dimana hasil dari

¹ Miragustia Mayza, dkk, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*", Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, NO. 1, Februari 2005, hal. 11-12

pembinaan tersebut akan di realisasikan melalui UMKM. Selain itu pembinaan tersebut banyak melibatkan organisasi-organisasi wanita seperti PKK. Dan di Kota Blitar perlu kita ketahui hampir semua sektor di kuasai oleh kaum perempuan, contohnya seperti driver, tukang parkir, pegawai pom, kegiatan jual beli di pasar dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan teori Malthus, mengatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan, artinya penambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Selain itu, kondisi ini mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk. Dan untuk mendorong suatu tingkat kesejahteraan yaitu dengan meningkatkan produksi dan distribusi.² Artinya jika jumlah penduduk semakin meningkat dan diimbangi dengan teknologi yang tinggi, produksi dan distribusi yang semakin meningkat, serta pembangunan pusat-pusat pelayanan masyarakat maka akan mendorong tingkat perolehan pendapatan asli daerah. Mengingat bahwasanya Kota Blitar dalam proses pembangunan pusat-pusat pelayanan masyarakat dari tahun ketahun sangat berkembang pesat, sehingga hal ini dapat merangsang masyarakat dalam membayar wajib pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dan

² Patta Rapanna et.all., *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 63

dalam hal ini, juga akan mendorong kesadaran masyarakat akan membayar pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Hendriyani, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Hasil ini ditunjukkan dengan hasil uji t variabel jumlah penduduk sebesar $3,633 > t$ tabel sebesar 2,447. Dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,011.³ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Hendriyani dengan penelitian sekarang terletak pada obyek penelitian yaitu menggunakan data dari Kabupaten Boyolali tahun 2006 sampai dengan 2015.

Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Iin Eko Pratiwi, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Sragen. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -6.638159 dengan arah negatif dan probilitas yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,0051.⁴ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Iin Eko Pratiwi dengan peneliti sekarang adalah tahun penelitian dan tempat penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Iin Eko Pratiwi di Kabupaten Sragen sedangkan

³ Novianti Hendriyani, "*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)*", Naskah Publikasi program strata 1 sarjana ekonomi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal. 7

⁴ Iin Eko Pratiwi, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013*", Naskah publikasi program strata 1 studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal. 12

penelitian ini bertempat di Kota Blitar, selain itu model yang digunakan menggunakan *Partial Adjustment Model* (PAM).

B. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu, yang dihitung berdasarkan harga konstan dan diukur dengan satuan rupiah. PDRB adalah salah satu indikator yang dijadikan sebagai gambaran pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan, struktur ekonomi serta keberhasilan pembangunan perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB setiap tahunnya, jika PDRB setiap tahunnya meningkat maka tingkat pendapatan perkapita masyarakat ikut meningkat begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. sehingga dapat diartikan apabila terjadi peningkatan PDRB maka akan meningkatkan PAD secara signifikan, begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap PDRB maka PAD juga menurun.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tarigan dalam Ali Chakim, PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, dimana PAD adalah fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan

menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan.⁵ Artinya, hal ini dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Miragustia Mayza dkk, yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Aceh. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 5.090 dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.⁶ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Migustia Mayza dkk dengan penelitian sekarang adalah tempat penelitian di Provinsi Aceh dan pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi dengan program shazam.

Akan tetapi penelitian ini tidak mendukung secara konstanten dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena F Asmuruf dkk, yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Sorong. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,904 dan nilai sigfikansinya sebesar 0,316 diatas 0,05.⁷ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena F Asmuruf dkk dengan penelitian sekarang

⁵ Ali Chakim, *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010, (Thesis Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas sebelas maret, Surakarta, 2011), hal. 44*

⁶ Miragustia Mayza, dkk, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Syiah kuala , Volume 3, No. 1, Februari 2015, hal. 14

⁷ Makdalena F Asmuruf, dkk, *“Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong”*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi, Volume 15 No. 05, 2015, hal. 735

adalah obyek penelitian dilakukan di Kota Sorong dan data yang digunakan tahun 2000 sampai dengan tahun 2013.

C. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Dimana jika terjadi inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, akan tetapi uang itu akan dirubah dalam bentuk barang yang siap pakai atau harus melalui proses produksi. Tingkat perkembangan inflasi dapat mempengaruhi perekonomian daerah baik secara negatif maupun positif. Apabila inflasi semakin tinggi maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian daerah, dan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Sehingga dapat diartikan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni Aryanti dan Iin Indarti, yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien $-0,443$ dengan tingkat signifikan $0,660$ pada alfa 5% . Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Eni Aryanti dan Iin Indarti dengan penelitian yang sekarang yaitu

pada obyek penelitian dimana penelitiannya di lakukan di Kota Semarang dan data yang diambil periode 2000-2009.⁸

Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw, inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah, dan pendapatan seseorang.⁹ Selain itu Simanjuntak menyatakan bahwasanya inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Dimana banyak dan sedikitnya jumlah uang yang beredar akan menentukan tinggi rendahnya inflasi. Dengan adanya inflasi, maka upah atau gaji akan naik. Dikarenakan dalam hal ini, upah riil tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan jika semakin tingginya tingkat inflasi pada suatu daerah maka akan di imbangi dengan semakin tinggi pula perolehan pendapatan di pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain inflasi mempunyai nilai yang tidak signifikan, artinya hanya mempunyai pengaruh rendah terhadap PAD. Seperti yang dikatakan diatas tadi bahwa inflasi mempunyai dampak pergerakan ekonomi yang bisa bersifat positif maupun negatif.

⁸ Eni Aryanti dan Iin Indarti, "Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang", Jurnal kajian akuntansi dan bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, 2012, hal. 44

⁹ Iwan Susanto, "Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2010)", Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal. 7

D. Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Retribusi pasar merupakan pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa peralatan, los dan kios atau bedak yang dikelola oleh pemerintah daerah khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar adalah salah satu komponen dari retribusi daerah yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan PAD, selain itu juga menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah pastinya memiliki sumber-sumber potensi keuangan yang bisa digali, salah satunya yaitu retribusi pasar. Retribusi pasar mempunyai kontribusi yang cukup besar di bandingkan retribusi-retribusi yang lainnya, terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan PAD.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. sehingga dapat diartikan retribusi pasar memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan PAD, dan jika penerimaan retribusi pasar naik maka tingkat penerimaan PAD juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori yang ada menurut Made Krisna dan Ni Gusti Putu dalam Meilda dalm Sri, menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk

mengoptimalkan perolehan retribusi daerah, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar retribusi, serta diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.¹⁰

Penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kusuma Wardana, yang menyatakan bahwa retribusi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gunungkidul. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien $4.452 > 1.67772$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kusuma Wardana dengan penelitian yang sekarang terletak pada variabel dependennya, dimana variabel dependen peneliti adalah PAD sedangkan variabel dependen Dimas adalah Retribusi Daerah.¹¹

E. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pajak daerah adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, dimana jika penerimaan pajak daerah meningkat maka penerimaan pendapatan daerah juga ikut meningkat, mengingat

¹⁰ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)”, e-Proceeding of Management, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 282

¹¹ Dimas Kusuma Wardana, “Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2016”, Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 4 April, 2018, hal. 16

bahwasanya pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menetapkan adanya pajak daerah dalam peraturan daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana pendapatann pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi peningkatan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika pajak daerah mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah juga ikut menurun.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman, yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar t tabel yaitu $39.837 < 2.00247$ dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 yaitu 0,000.¹² Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada obyek penelitian data yang didapat dari Kota Bandung periode tahun 2011-2015.

¹² Regina Usman, “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)*”, *Journal of Accounting and Finance*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 14

Menurut Siti Resmi dalam Galih dan Tree, mengatakan bahwa pajak bagi pemerintah daerah sangat berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*).¹³ Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya seperti pembangunan sarana prasarana yang ditujukan kepada masyarakat. Dan sebagai alat pengukur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya pajak memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah. hal ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah dengan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang sangatlah erat.

Teori diatas dapat diberlakukan pada wilayah Kota Blitar, yaitu sekmakin bertambahnya jumlah relasi pajak daerah yang diterima, maka akan meningkatkan penerimaan PAD. hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Blitar sudah berusaha mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, Kota Blitar dapat mengupayakan untuk terus meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah agar dapat terus menerus meningkatkan penerimaan PAD, yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

¹³ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analaisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", Jurnal STIE, Vol. 9 No. 1, Semarang, 2017, hal. 82

F. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar

Berdasarkan hasil dari Uji F, penelitian ini yang ditunjukkan oleh nilai probabilitasnya F -statistik yang lebih kecil dari taraf signifikansinya dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ menunjukkan bahwa jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, inflasi, retribusi pasar dan pajak daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB, inflasi, retribusi pasar dan pajak daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar. Sehingga dapat diartikan, jika semakin meningkatnya jumlah lima variabel independen tersebut akan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya apabila kelima variabel independen tersebut mengalami penurunan secara bersama-sama maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan asli daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan produktivitas yang tinggi, maka akan dapat meningkatkan penghasilan yang berimbas pada pendapatan. Hal ini juga berlaku pada PDRB, jika lapangan usaha yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri, sektor pertanian dan lain sebagainya mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Salah satu komponen yang berpengaruh

dalam PDRB adalah Inflasi. Inflasi merupakan keadaan perekonomian suatu negara atau daerah yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari apa yang telah dibutuhkan. Dalam hal ini inflasi akan sangat berperan dalam mempengaruhi penerimaan PAD.

Dan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat maka akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri akan wajib pajak, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Selain pajak, pendapatan daerah juga didapatkan dari Retribusi Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam Retribusi Daerah salah satunya Retribusi Pasar. Dimana retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar di setiap daerah pastinya memiliki jumlah yang cukup, dan di pasar pastinya setiap hari terjadi sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Maka dari itu bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di pungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksinya. Dalam hal ini retribusi pasar sangat berpengaruh pada retribusi daerah dan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini memberikan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Halim pada bukunya, yang dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya PAD. faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor kebijakan dan kelembagaan yang meliputi perubahan peraturan, pengadaan pembangunan baru, sumber pendapatan baru,

pajak serta retribusi daerah. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi yang meliputi produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan inflasi.

Dari penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pada, jumlah penduduk, produk regional domestik bruto, inflasi, retribusi pasar dan pajak daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Blitar. hal ini dapat diartikan bahwa kelima variabel independen tersebut secara bersama-sama dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

G. Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam pembangunan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan (*justice*) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dalam islam bukan hanya didasarkan pada pembangunan yang bersifat materil saja, tetapi juga didasarkan pada segi spritual dan moral disini sangat berperan. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan kesejahteraan masyarakat maka di perlukan dana dari penerimaan pemerintah, yang akan di implementasikan melalui keuangan publik. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan pembangunan tersebut dan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Islam menekankan dalam pencapaian

pemerataan dan kesejahteraan yang bersumber dari keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemaslahatan umat.

Menurut An-Nabahan dalam pemikiran islam, pemerintah adalah lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Dalam mewujudkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat nya tersebut, maka pemerintah memiliki beberapa kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan tugasnya. Dalam islam kebijakan fiskal sudah ada sejak masa Rasulullah Saw dan para Khulafaur Rasyidin, dimana tujuan dari kebijakan fiskal tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu terdapat tujuan lainnya yang terkandung dalam aturan islam yaitu islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.

Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, sumber pendapatan negara diperoleh dari beberapa sektor yaitu melalui pemungutan Zakat, *Khums*, *Jizyah*, *Kharaj*, *Usyur*, *Fai*, Harta Warisan *Kalalah* dan Wakaf, Sedekah. Dalam pengelolaan perbendaharaan negara pada masa ini, memusatkan kegiatan tersebut di *Baitul Mal* dimana setelah dikelola dengan baik maka akan digunakan untuk biaya yang akan digunakan dalam memenuhi kepentingan masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan masa sekarang, dimana penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah mulai bertambah dan

beragam diantaranya bersumber dari pemungutan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya. Seperti di daerah Kota Blitar, dimana penerimaan daerah diperoleh dari pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dimana semua hasil pungutan tersebut akan direalisasikan ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat terealisasinya penerimaan di Negara Islam, sehingga pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pendistribusian pendapatan yang adil. Sama halnya dengan pemahaman ekonomi konvensional, dalam ekonomi islam indikator makro ekonomi seperti Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi Pasar dan Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap penerimaan pemerintah seperti PAD.

Pada dasarnya penduduk atau manusia diciptakan sebagai *Khalifah* di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tugas ini sangat berat sehingga manusia harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia sesuai dengan amanat yang diemban atau sesuai dengan prinsip ekonomi islam, baik secara kolektif maupun individual. Selain itu, dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui sebuah pendidikan.

Jadi dengan adanya kualitas mutu pendidikan yang dimiliki oleh para penduduk, maka akan menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja semakin tinggi. Serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin

produktivitas dalam bekerja maupun menciptakan tenaga kerja, diharapkan dapat meningkatkan serta memperlancarkan pembangunan daerah yang akan menjadi media dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi islam, dimana pendapatan atau penerimaan daerah di realisasikan secara merata untuk kemaslahatan umatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Blitar menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengasumsikan, bahwa peningkatan jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi tingkat PAD. Sehingga dengan hasil tersebut menandakan masyarakat Kota Blitar sudah mulai banyak yang bekerja atau masyarakat produktif. Dimana masyarakat Kota Blitar pada umumnya bekerja di bidang perdagangan, kontruksi, keuangan dan jasa-jasa lain nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada QS. An-Najm ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٣٩

Artinya : “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan di bumi harus berusaha untuk bekerja keras dan bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam menciptakan taraf kehidupan yang layak atau dapat memenuhi kebutuhannya.

PDRB dalam Ekonomi Islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakatnya melalui pendapatan perkapita masyarakat dengan menggunakan parameter *fallah*. *Falah* merupakan kesejahteraan yang hakiki,

kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) yaitu sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare* (*fallah*), kesejahteraan yang sebenarnya. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Maka dari itu, selain harus memaksukkan unsur *falah* dalam analisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Hubungan PDRB dengan PAD dalam ekonomi islam yakni, peningkatan pendapatan setiap masyarakat dapat mempengaruhi PDRB sehingga akan berdampak pula terhadap penerimaan zakat ataupun pajak lainnya, hal ini juga akan berdampak pada penerimaan pemerintah. Dengan begitu dapat dengan mudah untuk mencapai kesejahteraan (*fallah*) yang sesungguhnya, karena tujuan utama dari ekonomi islam yaitu mencapai kesejahteraan umat. Sehingga apabila PDRB meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, dan dari pendapatan masyarakat tersebut nantinya akan mendorong tercapainya realisasi penerimaan daerah melalui pajak maupun zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Blitar menjelaskan bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengasumsikan tertibnya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota atau daerah. Sehingga hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak, retribusi dan pemerintah daerah, selain itu tingkat

kesejahteraan dan keadilan di masyarakat akan tercapai. Meningkatnya PDRB akan memberikan dampak yang baik dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah seperti zakat, kharaj, sedekah dan lainnya, dikarenakan ikut meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dalam islam, merupakan sesuatu keadaan yang buruk dan harus dihindari dari perekonomian. Para tokoh ekonomi islam menyatakan bahwa, inflasi berakibat buruk bagi perekonomian dikarenakan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk barang-barang mewah serta norn-primer.

Al-Maqrizi tokoh ekonom islam, membagi inflasi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang, inflasi jenis ini terjadi pada masa Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin* yakni dikarenakan kekeringan atau karena peperangan. *Kedua*, Inflasi akibat kesalahan manusia, inflasi ini diakibatkan oleh beberapa faktor yakni korupsi, administrasi yang buruk dan pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang beredar berlebihan.

Pada masa Rasulullah Saw dan khulafaur Rasyidin untuk menjaga kestabilan perekonomian, pemerintah islam menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dimana kebijakan fiskal tersebut digunakan untuk menekan laju inflasi. Dapat dipahami bahwasanya dalam islam dilarang adanya pemborosan dan berlebihan-lebihan dan konsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat mengakibatkan

keadaan ekonomi menjadi *full employment*, maka kenaikan agregat tidak akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional dan akan berdampak pada anggaran penerimaan negara. Sehingga dalam menghadapi masalah tersebut pemerintah Islam memaksimalkan fungsi penerimaan zakat menggunakan *Baitul Mal* sehingga dikelola dengan baik penerimaan negara untuk mencapai stabilitas ekonomi dan terhindar dari masalah inflasi.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Blitar menjelaskan Inflasi memiliki pengaruh terhadap PAD, artinya jika tingkat inflasi semakin tinggi maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. Inflasi yang terjadi di Kota Blitar secara menyeluruh disebabkan oleh kesalahan manusia, dimana inflasi yang terjadi diakibatkan dari naik turunnya permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat itu sendiri.

Retribusi pasar dalam Islam, merupakan sumber pemasukan negara dan digunakan untuk berbagai keperluan umatnya secara merata dan adil, yakni untuk kepentingan masyarakatnya seperti pembangunan fasilitas-fasilitas serta pelayanan umum. Dan setiap orang yang telah memanfaatkan fasilitas pelayanan umum, yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maka sudah kewajiban mereka, untuk memberikan balasan atas manfaat yang telah diambil atau dipakai dari fasilitas tersebut.

Hal ini berbanding terbalik dengan pajak yang dipungut secara *dzalim* dan paksa oleh penguasa, sehingga tidak ada kerelaan masyarakat atas harta yang

diambil tersebut. Dan hal ini menyimpang dari prinsip syariat islam. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29¹⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan retribusi disamping zakat dalam ekonomi islam itu dibolehkan selama tidak ditemukannya sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemaslahatan umat serta adanya ketentuan pemungutan pajak. Maka dari itu retribusi dapat diterapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hasil dari retribusi juga akan di alokasikan serta di distribusikan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Sedangkan Pajak dalam Ekonomi Islam sangatlah memberikan pengaruh terhadap penerimaan pemerintah. Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan

¹⁴ Al-Qur'an, 4:29

kharaj dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Islam mempunyai pandangan mengenai hukum pajak, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Dan dari 2 pandangan diatas yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pajak itu diperbolehkan, karena pajak disini di ibiratkan sebagai ibadah setelah adanya zakat. Pajak ini sebagaimana bentuk ketaatan kita terhadap *waliyyul amri* dimana *amri* ini sebagai pemerintah. Dan pajak tersebut alangkah baiknya di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah setempat dikarenakan pajak tersebut pun nantinya akan kembali lagi masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam bentuk pelayanan-pelayanan, pembangunan, fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Blitar menjelaskan bahwa retribusi pasar dan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengasumsikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi pasar dan pajak daerah akan meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah. Retribusi pasar dan pajak daerah mengalami peningkatan penerimaan, dikarenakan tertibnya masyarakat dalam membayar retribusi pasar dan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan sebuah timbal balik

masyarakat kepada pemerintah daerah, terhadap fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat sudah terealisasi.